

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan yang saat ini dibagi dari pemerintah pusat hingga daerah. Negara Republik Indonesia telah memperbaharui sistem pemerintahan yang lebih efektif dengan memperhatikan situasi di setiap daerah. Pelimpahan kekuasaan tersebut dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam bingkai Negara kesatuan. Prinsip tersebut memberikan wewenang kepada setiap kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada pasal 18 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 tertuang bahwa setiap daerah di Indonesia di bagi atas daerah besar dan kecil untuk membentuk susunan pemerintahnya. Pemerintah pusat untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di berikan kewenangan untuk pembangunan daerahnya.

Menurut UU no 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan republik indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan Desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintahan. Kegagalan program ditingkat Desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintah di atasnya juga. Riyanto (2018). Mengungkapkan bahwa pengelolaan dana Desa dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana publik seperti dana Desa. Kepala Desa sebagai agen utama dalam good governance diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip ini untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan manfaat optimal dari dana Desa bagi masyarakat. Dalam rangka menciptakan *good goverment* disuatu Negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta

dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat secara prakarsa, hak, asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Bintarto (2009) Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Kepala Desa sebagai pemimpin administratif Desa memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan Desa, termasuk dana Desa. Perannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana Desa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, 2015). Kepala Desa diharapkan tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan Desa. Menurut pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa (Indrianisari, 2017). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dpr.go.id, 2022). Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Perkembangan Desa dapat didasari atas wilayah dan kepemimpinan yang mana Kepala Desa memiliki otoritas atas wilayah dan masyarakatnya. Pengelolaan Dana Desa merupakan wewenang Pemerintahan Desa. Sumber anggaran atau Dana Desa bersumber dari beberapa jenis. Pertama Sumber Dana Desa yang diberikan Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua Pendapatan Asli Desa (PAD). Menurut Yuliansyah (2016) Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pembangunan Desa selayaknya mengarah pada kesejahteraan masyarakat Desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. (djpk.kemenkeu.go.id, 2024). Pengelolaan dana Desa merupakan sebuah tantangan yang kompleks di banyak daerah di Indonesia. Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan langsung kepada Desa-Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan program-program sosial lainnya.

Pengelolaan dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa. Dalam konteks ini, peran kepala Desa memiliki pengaruh signifikan karena bertanggung jawab dalam mengelola dan mengalokasikan dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Penelitian ini mengkaji peran kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Desa Sukabudi merupakan salah satu dari tujuh Desa yang berada di kecamatan sukawangi kabupaten bekasi. Tema penelitian ini ialah “peran kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa
2. Apakah pengelolaan Dana di Desa Sukabudi sesuai amanat undang undang nomor 6 tahun 2014?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui peran kepala Desa dalam mengelola Dana Desa
2. Mengetahui pengelolaan Dana sesuai amanat undang undang no 6 tahun 2014

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori organisasional dan pengelolaan Dana atau anggaran, khususnya di lingkungan pemerintahan Desa Sukabudi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan rujukan diantaranya sebagai berikut:

Rujukan Penelitian Pertama, penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang intrastruktur di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi” oleh Windah (2020). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa Sukabudi dalam pemberdayaan masyarakat Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Sukabudi kecamatan sukaangi kabupaten bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembngunan di Desa Sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten bekasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukabudi dengan metode penelitian kualitatif dengan metode snoebale, dengan informan sebanyak 9 (Sembilan) orang. Teori yang digunakan pendapat dari veitzal rivai 92003) tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur Desa Sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten bekasi. Menunjukkan bahwa: (1) adanya koordinasi yang baik antara kepala Desa dengan masyarakat; (2) pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah; (3) komunikasi dilakukan secara rutin melalui rapat mingguan; (4) perhatian terhadap bawahan dilakukan pada saat rapat koordinasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi program pemberdayaan.

Rujukan Penelitian Kedua penelitian yang berjudul “Peran perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)” oleh Neny Tri Indrianasari (2017). Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran perangkat Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa sudah cukup. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan angket. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yang terlibat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan Desa dan dalam keseluruhan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri no. 113 2014.

Pertanggungjawaban pengelolaan mulai dari rancangan, perangkat Desa melakukan musyawarah untuk membahas RPJMDes. Dalam pengajuan Dana keuangan Desa keuangan Desa disertai dengan anggaran biaya dan bendahara Desa untuk membayar sesuai rencana anggaran yang telah disetujui oleh Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa dilakukan dengan menggunakan pembukuan yang dimasukkan ke dalam buku besar, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan keuangan Desa atas penggunaan Dana dalam satu tahun. Dalam pertanggungjawaban perangkat Desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Rujukan Penelitian Ketiga penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” oleh Yamulia Hulu*, R. Hamdani Harahap&Muhammad Arif Nasution (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk Desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang Dana Desa yang diinterpretasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa tidak transparan, penduduk Desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah Desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk Desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah Desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah Desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk Desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas

Rujukan Penelitian Keempat penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang” oleh Depi Rahayu (2017). Penelitian ini mengidentifikasi tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan karena Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan Desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan

menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya Dana Desa, dan menentukan strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di Desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu dengan mengefektifkan Dana-Dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.

Rujukan Penelitian Kelima penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi kasus Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)” oleh Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, Johny P. Lengkong (2017). Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengembangan lembaga keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Oleh karena itu didalam membangun masyarakat Desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat Desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala Desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber penDanaannya telah diatur dalam perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafli dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di Desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Rujukan Penelitian Keenam penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu” oleh Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw (2019). Peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan.

Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah Desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur Desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik

maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur Desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat Desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

Rujukan Penelitian Ketujuh penelitian yang berjudul “Efektifitas pengelolaan dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Wonosobo” oleh Boedijono, Galih Wicaksono*, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa dan efektivitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat peDesaan di Kabupaten Bondowoso.

Tiga kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang sebagai wilayah lapang, dan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Desa-Desa di Kabupaten Bondowoso telah mengelola keuangan Desa dengan baik, namun pada beberapa kasus masih belum tertib administrasi sehingga terkadang mengalami keterlambatan pencairan keuangan Desa untuk periode berikutnya. Diskusi dan implikasi dari temuan dibahas dalam artikel.

Rujukan Penelitian Kedelapan penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud” oleh Yolanda Madea Alden Laloma Very Y. Londa (2017). Fenomena dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa, dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa tidak melibatkan komponen masyarakat selain kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBDes kepada masyarakat tidak dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/menjelaskan peran kepala Desa dalam pengelolaan Dana

Desa di Kecamatan Essang Selatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peran kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan. Mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Penentuan informan didasarkan pada kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Program Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan secara bertahap belum menerapkan konsep pembangunan partisipasi masyarakat Desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif, responsif, transparan, guna mewujudkan setiap prioritas program kebutuhan masyarakat. Desa yang diselenggarakan melalui Musrembangdes, pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dalam musyawarah kan, namun permasalahannya adalah kurangnya pengawasan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat yang kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan dan Pemberdayaan. Evaluasi Dana Desa tahun 2016 sudah berjalan namun, dalam keberhasilan pembangunan tidak lepas dari kendala dalam pengerjaannya

Rujukan Penelitian Kesembilan penelitian yang berjudul “Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana Desa, komitmen organisasi Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Gorontalo” oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah Desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo masih jauh dari harapan.

Masalah yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berkaitan dengan kompetensi aparat pengelola Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas

pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan sampel adalah aparat pengelola Dana Desa di Kabupaten Gorontalo sejumlah 120 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien determinasi adalah 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelola Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan Dana Desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelola Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat

Rujukan Penelitian Kesepuluh penelitian yang berjudul “Pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana Desa” oleh Adinda Gita Lestari (2019). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana proses penyampaian yang dilakukan Kepala Desa dalam penyampaian upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi Dana Desa. Dalam penyampaian hal ini tentu saja terdapat hambatan sebelum proses dari program alokasi Dana Desa. Kepala Desa dan perangkat Desa bekerja sama dalam menyampaikan hal ini kepada masyarakat dan tidak ada satu pun pesan yang tertinggal terkait informasi yang akan disampaikan. Dalam penyampaiannya adanya indikator yang dilakukan sebelum memulai program alokasi Dana Desa di

Desa Sakhuda Bayu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Informasi Organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi Dana Desa di Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik data primer, yaitu wawancara dan observasi serta teknik data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi Dana Desa ialah disampaikan dan dilakukan dengan baik dan dapat diterima dengan baik serta tepat sasaran dan menghasilkan perubahan. Dari segi penyampaian, informasi yang disampaikan mengenai alokasi Dana Desa sudah efektif dan tepat sasaran sehingga program alokasi Dana Desa ini bisa berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah, pertama di Desa Sukabudi yang membahas tentang peran kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten bekasi. Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran kepala Desa dalam mengelola dana Desa serta pengelolaan dana Desa di Desa Sukabudi sesuai amanat undang-undang No 6 Tahun 2014. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pemerintah Desa Sukabudi agar kedepannya semakin baik dalam mengelola dana Desa.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber terhadap pemerintahan Desa Sukabudi. Kemudian penelitian ini diharap mampu mempengaruhi kinerja kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Penulisan menjelaskan mengenai latar belakang, Perumusan masalah, tujuan, Signifikansi Penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori maupun pengertian menurut para ahli yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian “bab yang memang menjelaskan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti Tinjauan teori, Defnisi, Kerangka Pemikiran, Asumsi Penelitian.

3. Bab III Metodologi

Menjelaskan Paradigma penelitian, paradigma konstruktifvisme metode penelitian kualitatif, Desain penelitian, sumber dan Teknik perolehan data, goodness dan quality creteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, keterbatasan penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian, serta paparan hasil penelitian di lapangan (Desa Sukabudi)

5. Bab V Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.